

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Perkawinan Campuran

Perkawinan merupakan elemen fundamental dalam membentuk keluarga yang harmonis dan dilandasi kasih sayang. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan perlu diatur melalui norma hukum (Widanarti, 2019). Kehadiran norma hukum sangat penting untuk menetapkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap anggota keluarga demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Selain memiliki dimensi keagamaan, perkawinan juga merupakan suatu tindakan hukum, karena pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diresmikan pada 2 Januari 1974, serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1975 (Dewi, 2022).

Sebelum membahas perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Mengenai perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian diantaranya yang dinyatakan dalam perundang-undangan dan pengertian

perkawinan campuran yang berkembang dalam masyarakat sehari-hari (Utami, 2021). Dalam khasanah perundang-undangan, dikenal adanya Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158 selanjutnya disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*).

Pengertian perkawinan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut, perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Dari pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai perkawinan campuran adalah (Akbar, 2024) :

- a.) Perkawinan Internasional ; yaitu antara waganegara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
- b.) Perkawinan antar golongan ; (*intergentiel*). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial;
- c.) Perkawinan antar Adat, misalnya perkawinan antara perempuan Sunda dengan Pria Jawa;
- d.) Perkawinan antar Agama, perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Contoh perempuan beragama Islam menikah dengan pria beragama Kristen. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut tidak berlaku.

Pengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-

undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya (Sholikhawati, 2024).

Dengan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah , demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu : 1) Hubungan hukum antara suami istri, 2). Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan 3). Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dari latar belakang etnis, budaya, atau negara yang berbeda, memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari perkawinan lainnya. Berikut adalah beberapa ciri umum perkawinan campuran (Naswar, 2024):

- a.) Keberagaman etnis dan budaya; Pasangan dalam perkawinan campuran berasal dari kelompok etnis atau budaya yang berbeda. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam tradisi, bahasa, adat istiadat, serta norma-norma sosial.

- b.) Bahasa yang beragam; penggunaan beragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Selain itu, anak-anak mungkin tumbuh dengan pemahaman dan penggunaan lebih dari satu bahasa.
- c.) Akulturasi dan integrasi budaya; terjadi proses akulturasi di mana pasangan mengintegrasikan unsur-unsur budaya satu sama lain, serta adanya penerimaan dan adopsi norma-norma budaya dari pasangan.
- d.) Kesadaran dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam perkawinan campuran, terdapat kesadaran yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan etnis antara pasangan, serta adanya penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai masing-masing pasangan.
- e.) Penerimaan dan tantangan dari masyarakat. Perkawinan campuran mungkin dihadapi dengan penerimaan atau tantangan dari masyarakat sekitar. Juga adanya pengaruh pandangan masyarakat terhadap stabilitas dan keberhasilan perkawinan.
- f.) Proses akulturasi anak. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan campuran mengalami proses akulturasi pada pembentukan identitas mereka, dan mampu mengatasi identitas ganda dan memahami keberagaman sebagai kekayaan.
- g.) Tantangan komunikasi dan penyesuaian. Terdapat tantangan dalam komunikasi karena perbedaan bahasa dan gaya komunikasi serta proses penyesuaian terhadap perbedaan budaya untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga.

- h.) Perbedaan agama. Dalam beberapa kasus, perkawinan campuran melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Penanganan harmonisitas dalam perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan juga seringkali ada.
- i.) Pentingnya fleksibilitas dan kompromi. Salah satu kunci kesuksesan perkawinan campuran yang menjadi cirinya adalah adanya fleksibilitas dan kemampuan untuk berkompromi. Terjadi keterbukaan terhadap perubahan dan adaptasi terhadap kebutuhan dan nilai-nilai bersama.
- j.) Pembentukan identitas keluarga unik. Dalam perkawinan campuran, terbentuknya identitas keluarga yang unik, yang mencerminkan perpaduan dan integrasi unsur-unsur dari masing-masing pasangan, serta adanya kesadaran akan kekayaan keberagaman dan keunikannya.
- k.) Perkawinan campuran menawarkan kesempatan untuk memahami dan merayakan keberagaman, tetapi juga menuntut keterbukaan, toleransi, dan komunikasi yang baik agar dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

2.2. Teori Adaptasi Budaya

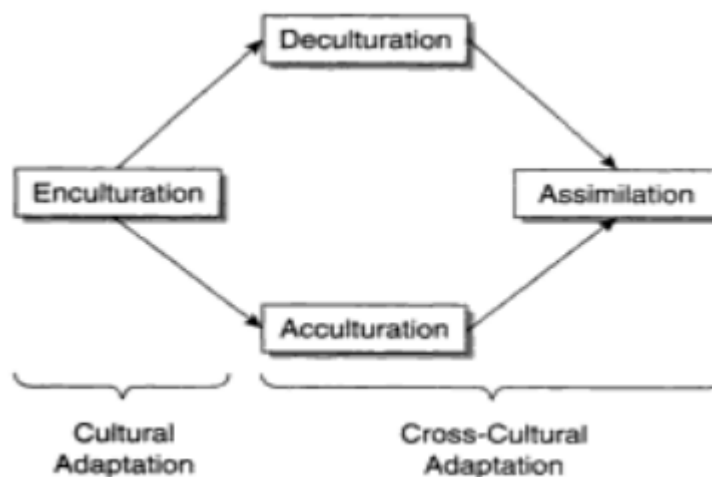
John William Bennett, seorang antropolog dan ahli dalam bidang ekologi manusia, dikenal melalui penelitiannya mengenai bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Menurut penjelasan Bennett yang dikutip oleh Christianto (2020), adaptasi manusia berakar dari pandangan

evolusioner, di mana individu maupun kelompok secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, baik secara biologis maupun secara sosial dan budaya. Proses adaptasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya yang dianut, yang mencakup cara berpikir dan pengambilan keputusan yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan lingkungan tempat tinggal mereka.

Adaptasi menjadi tantangan yang harus dihadapi ketika individu atau kelompok berinteraksi dengan pihak lain yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dalam konteks komunikasi antarbudaya, adaptasi biasanya dikaitkan dengan transformasi yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Individu yang menerapkan strategi adaptif umumnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap ekspektasi serta tuntutan lingkungan, sehingga lebih terbuka untuk menyesuaikan perilakunya (Utami, 2015).

Menurut temuan Kim yang dikutip oleh Utami (2015), proses adaptasi dapat dibagi ke dalam dua tahap utama, yaitu *cultural adaptation* dan *cross-cultural adaptation*. *Cultural adaptation* merujuk pada proses mendasar dalam komunikasi, di mana terjadi pertukaran pesan antara pengirim dan penerima melalui suatu media tertentu, yang mencakup kegiatan pengkodean (encoding) dan penguraian pesan (decoding). Dalam konteks ini, adaptasi budaya dipahami sebagai suatu bentuk perubahan yang dialami individu saat ia memasuki dan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Perubahan ini terjadi melalui interaksi yang terus-menerus dengan masyarakat setempat. Ketika individu yang baru datang mulai memahami dan merespons pesan-pesan sosial dan budaya yang dikirimkan oleh masyarakat

lokal, maka proses *enculturation* berlangsung. *Enculturation* sendiri merupakan bagian dari proses sosialisasi, di mana seseorang secara bertahap mempelajari norma, nilai, dan kebiasaan dalam budaya yang baru melalui pengalaman sehari-hari dan hubungan sosial yang dijalin dalam lingkungan tersebut (Soemantri, 2019).



Gambar 2.1. Hubungan Adaptasi Antar Budaya

Sumber: Kim (2001)

Tahap kedua dalam proses adaptasi lintas budaya dikenal dengan istilah *cross-cultural adaptation*. Proses ini mencakup tiga aspek utama, yang pertama adalah *acculturation* atau akulturasi. Pada tahap ini, individu pendatang yang sebelumnya telah melalui proses sosialisasi mulai berinteraksi lebih dalam dengan budaya baru yang asing bagi mereka. Seiring waktu, pendatang mulai mengenali, memahami, bahkan mengadopsi norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Meski begitu, budaya asal yang telah membentuk kepribadian dan cara pandang individu sebelumnya tetap memiliki pengaruh dalam proses ini (Utami, 2015).

Aspek kedua dalam *cross-cultural adaptation* adalah *deculturation*, yaitu proses di mana sebagian elemen budaya asal mulai ditinggalkan atau tidak lagi relevan dalam lingkungan baru. Perpaduan antara akulturasi dan dekulturasi tersebut berkontribusi terhadap perubahan dalam aspek psikologis dan perilaku sosial individu pendatang, termasuk dalam pembentukan identitas baru yang selaras dengan norma dan nilai budaya yang baru. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, muncul resistensi atau penolakan terhadap budaya baru karena adanya konflik nilai atau ketidaknyamanan. Dalam kondisi seperti itu, tidak jarang individu justru menarik diri dari interaksi dengan penduduk lokal dan memilih untuk mengisolasi diri (Patawari, 2020).

2.3. Teori Negosiasi Identitas

Stella Ting-Toomey, dalam teorinya tentang negosiasi identitas yang dikutip oleh Beauchamp dan Baran (2017), menyatakan bahwa identitas individu terbentuk melalui suatu proses interaktif, yaitu negosiasi antara cara seseorang memandang dirinya sendiri dan cara orang lain memandang dirinya. Dalam setiap interaksi sosial, seseorang tidak hanya menyampaikan siapa dirinya, tetapi juga sekaligus merespons bagaimana orang lain menginterpretasikan identitas tersebut. Proses ini melibatkan upaya untuk menegaskan, mempertanyakan, bahkan merevisi berbagai asumsi terkait identitas diri dan identitas orang lain. Ting-Toomey juga mengemukakan bahwa proses pembentukan identitas ini sebenarnya telah dimulai sejak masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga, dan selanjutnya dikembangkan seiring pertumbuhan individu melalui pengalaman serta interaksi yang lebih luas di masyarakat.

Dalam kerangka teorinya, Ting-Toomey membedakan antara identitas budaya dan identitas pribadi, sebagaimana dijelaskan oleh Littlejohn dan rekan-rekannya (2014). Identitas budaya merujuk pada aspek-aspek yang menunjukkan keterikatan seseorang dengan kelompok sosial atau budaya tertentu, seperti suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Identitas ini menunjukkan keanggotaan individu dalam suatu komunitas yang lebih besar. Sebaliknya, identitas pribadi mencakup ciri khas individu yang bersifat unik dan membedakan dirinya dari orang lain, seperti minat pribadi, bakat, serta pilihan atau preferensi yang dimiliki. Kedua jenis identitas ini saling melengkapi dalam membentuk jati diri seseorang secara menyeluruh (Paramita, 2022).

Negosiasi identitas muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara identitas individu dengan identitas yang dianut oleh kelompok sosial tempat individu tersebut berada. Sebagai contoh, seorang perempuan yang memiliki identitas diri yang feminin mungkin perlu melakukan proses negosiasi ketika menjadi bagian dari komunitas penggemar sepak bola, yang umumnya memiliki karakteristik identitas kelompok yang maskulin (Setya, 2022). Melalui proses negosiasi ini, perempuan tersebut dapat menyesuaikan dan menyeimbangkan identitasnya agar dapat diterima dalam lingkungan tersebut. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan kenyamanan dan kualitas keterlibatannya sebagai penggemar sepak bola, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan rasa diterima, dihargai, dan aman dalam komunitas tersebut (Satwika, 2020).

Dalam perspektif budaya, identitas erat kaitannya dengan perasaan keterhubungan seseorang dengan kelompok budaya yang lebih besar. Keterkaitan

ini menciptakan hubungan budaya yang penting dalam pembentukan identitas budaya dan etnis, yang meliputi aspek-aspek seperti asal, ras, agama, dan bahasa. Identitas budaya dan etnis dapat dikenali melalui dua elemen utama, yaitu nilai isi (value content) dan ciri khas (salience). Nilai isi mengacu pada berbagai evaluasi yang dibentuk berdasarkan keyakinan budaya yang berlaku, sementara ciri khas merujuk pada kekuatan afiliasi atau hubungan yang menghubungkan individu dengan kelompok budaya besar, serta nilai yang terkandung dalam hubungan tersebut (Littlejohn dan Foss, 2014:133).

Ting-Toomey mengemukakan bahwa penerapan konsep mindfulness sangat penting dalam komunikasi lintas budaya. Dalam konteks ini, mindfulness diartikan sebagai kesiapan individu untuk mengubah pola pikir atau kerangka referensi yang telah terbentuk sebelumnya. Hal ini mencakup motivasi untuk mengadopsi kategori-kategori baru yang lebih sesuai dalam memahami perbedaan budaya. Selain itu, mindfulness juga melibatkan kesediaan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang kreatif dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah yang mungkin timbul akibat perbedaan kebudayaan. Dengan kata lain, mindfulness berfungsi sebagai landasan untuk menghadapi dan menanggapi perbedaan budaya dengan cara yang lebih terbuka dan inovatif, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung lebih efektif dan harmonis (Ting-Toomey, 1999:46).

Dalam konteks evaluasi komunikasi budaya untuk mencapai mindfulness, Ting-Toomey mengadopsi dua kriteria komunikasi yang kompeten yang dikemukakan oleh Spitzberg dan Cupach, yaitu ketepatan (appropriateness) dan efektivitas (effectivity). Ketepatan merujuk pada sejauh mana perilaku komunikasi

seseorang dianggap sesuai dan dapat memenuhi ekspektasi yang ada dalam budaya tertentu. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan kemampuan seorang komunikator untuk menciptakan pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat, guna mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Dengan kata lain, kedua kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana komunikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam konteks perbedaan budaya (Putri, 2023).

Di sisi lain, individu yang menjadi objek negosiasi identitas dapat dikatakan telah menerima identitas yang dinegosiasikan apabila ia merasakan kenyamanan terhadap identitas tersebut. Ting-Toomey (dalam Littlejohn dan Foss, 2014:133) menjelaskan bahwa seseorang akan mencapai kondisi bikulturalisme fungsional ketika ia mampu secara fleksibel menerima dan menyesuaikan identitas yang dinegosiasikan, serta dapat mengintegrasikan identitas tersebut ke dalam diri mereka. Proses ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan dengan identitas yang lebih inklusif, mencakup identitas yang berbeda-beda dengan cara yang seimbang.

2.4. *Family Communication*

Komunikasi antar anggota keluarga memainkan peran krusial dalam dinamika konflik antara orang tua dan anak. Lindgaard dan rekan-rekannya (2009) menyatakan bahwa hambatan dalam komunikasi keluarga dapat menjadi pemicu konflik, terutama ketika tidak ada keterbukaan dalam berbagi pengalaman hidup dalam lingkup keluarga. Sebagai contoh, ketika orang tua mencoba menunjukkan kasih sayang melalui candaan atau godaan, anak justru dapat menangkapnya

sebagai bentuk kritik atau ejekan, sehingga terjadi kesalahpahaman. Situasi seperti ini menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dan saling memahami antar anggota keluarga (Salsabila, 2021).

Selain itu, komunikasi dalam keluarga merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan memiliki kekhasan tersendiri dalam setiap rumah tangga (Segrin & Flora, 2011). Interaksi antara orang tua dan anak dibangun melalui pola komunikasi yang unik dan berulang (Odenweller & Harris, 2018). Untuk memahami dinamika ini lebih dalam, Koerner dan Mary Anne (dalam Salsabila, 2021) mengembangkan konsep *family communication patterns* yang bertujuan menggambarkan bagaimana keluarga membangun diskursus internal, serta bagaimana mekanisme pembelajaran nilai, kepercayaan, dan sikap berlangsung dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

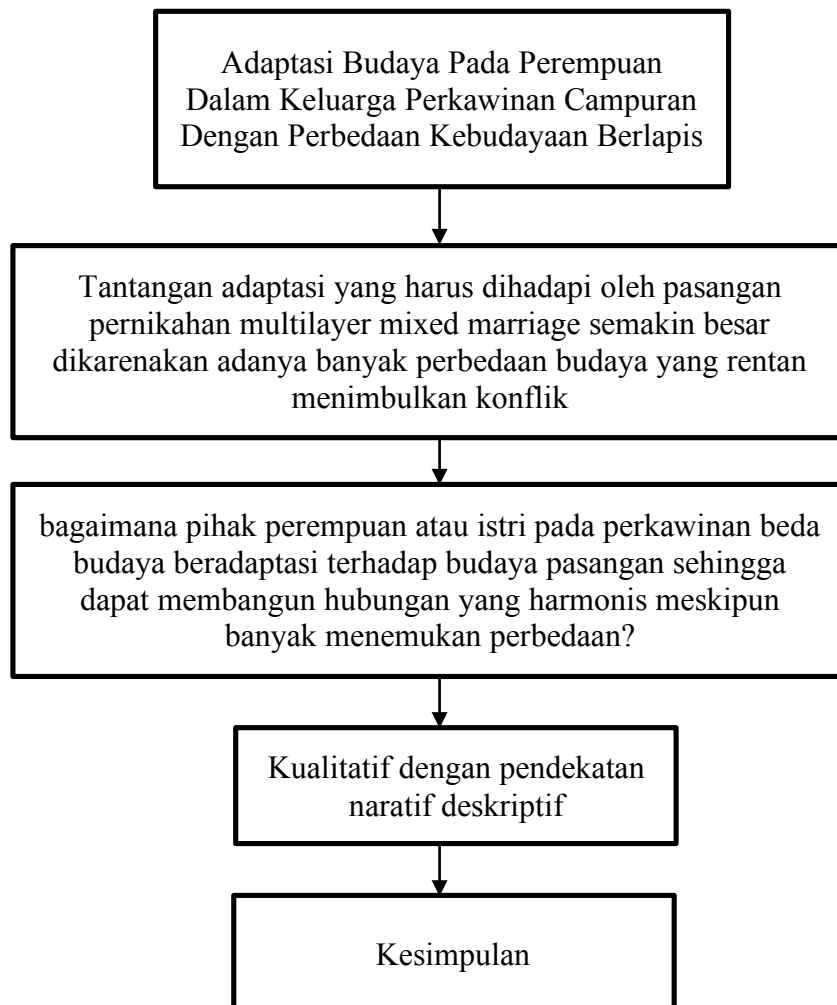
Konsep *family communication patterns* yang diperkenalkan oleh Ritchie dan Fitzpatrick (dalam Candra, 2022) menjelaskan bahwa pola komunikasi dalam keluarga terbentuk dari dua dimensi utama, yaitu *conversation orientation* dan *conformity orientation*. Kedua dimensi ini menggambarkan bagaimana keluarga membentuk hubungan dan menyampaikan nilai-nilai melalui proses komunikasi sehari-hari. Dimensi ini sangat penting untuk memahami bagaimana interaksi antar anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, dapat mempengaruhi dinamika psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga.

Conversation orientation merujuk pada sejauh mana anggota keluarga didorong untuk terlibat secara aktif dalam diskusi dan pertukaran pendapat mengenai berbagai macam topik. Dalam keluarga dengan orientasi ini, komunikasi

bersifat terbuka, bebas, dan mendorong adanya partisipasi setara dari semua anggota, termasuk anak-anak. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keterampilan sosial dan emosional anak, serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan secara jujur tanpa takut dihakimi (Shofia, 2023).

Sebaliknya, *conformity orientation* menggambarkan tingkat di mana anggota keluarga diharapkan untuk menunjukkan kesamaan dalam hal sikap, nilai, dan kepercayaan. Keluarga dengan orientasi ini cenderung menekankan ketaatan, keseragaman pendapat, dan penghormatan terhadap otoritas, yang sering kali diwakili oleh orang tua. Dalam konteks konflik antara orang tua dan anak, penelitian oleh Curran dan Allen (2017) menunjukkan bahwa individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat *conformity orientation* yang tinggi lebih rentan mengalami konflik personal. Sebaliknya, mereka yang berasal dari keluarga dengan orientasi percakapan yang tinggi cenderung lebih jarang mengalami konflik personal, karena keterbukaan komunikasi memfasilitasi pemahaman dan penyelesaian masalah secara konstruktif.

2.5. Kerangka Pikir



Gambar 2.2. Kerangka Pikir